

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang memuat sasaran yang harus dicapai serta Kebijakan dan Program Tahun 2017–2021.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk terciptanya sinkronisasi antara Program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dibutuhkan pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) 2017 - 2021 OPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja OPD menterjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan

program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan R APBD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2017 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 – 2021 yaitu : **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF”**.

Rencana Kerja ini nantinya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan selama tahun 2018.

Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan kedepan perlu terus dilakukan didukung dengan situasi yang kondusif. Sejalan dengan hal itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, telah sedang dan akan melakukan berbagai program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik dalam upaya menciptakan persatuan dan Kesatuan, keamanan serta Kenyamanan masyarakat yang berorientasi pada Humbang Hasundutan Yang berkelas nasional dalam hal kemakmuran, tata kelola, dan mentalitas unggul melalui pemberdayaan masyarakat, pendayagunaan potensi alam dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara khusus di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis. Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan Aparatur Negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahunan, merupakan penjabaran teknis atas Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan yang berfungsi sebagai Pengkajian dan penyiapan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan dan Standar pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan Politik untuk jangka waktu 1(satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah memberikan arah dan manfaat secara optimal seluruh sumber daya yang ada di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan secara internal maupun eksternal sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerjasama dan kemitraan dengan segenap komponen strategis dalam masyarakat yang mengutamakan keunggulan kompetitif untuk mencapai tujuan.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018 adalah :

1. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
2. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembangunan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Data Umum Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Jumlah PNS Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak : 13 Orang.

1. **MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN**

NO	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ESELON II	1	-	1
2	ESELON III	3	-	3
3	ESELON IV	3	1	4
4	FUNGSIONAL UMUM	5	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

2. **MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	-	-	-
2	SLTP SEDERAJAT	-	-	-
3	SMA SEDERAJAT	1	-	1
4	DIPLOMA I, II	-	-	-
5	DIPLOMA III	1	-	1
6	D IV/SARJANA s.d. DOKTOR	10	1	11
<b>Jumlah Tahun 2018</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

3. **MENURUT TINGKAT KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN**

NO	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<b>Golongan I</b>				
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-

# RENCANA KERJA | 2019

Golongan II				
1	II/a	-	-	-
2	II/b	-	-	-
3	II/c	2	-	2
4	II/d	-	-	-
Golongan III				
1	III/a	2	-	2
2	III/b	3	1	4
3	III/c	-	-	-
4	III/d	2	-	2
Golongan IV				
1	IV/a	-	-	-
2	IV/b	3	-	3
3	IV/c	-	-	-
4	IV/d	-	-	-
5	IV/e	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

#### 4. MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	18-20	-	-	-
2	21-25	-	-	-
3	26-30	-	-	-
4	31-35	2	1	3
5	36-40	4	-	4
6	41-45	1	-	1
7	46-50	1	-	1
8	51-55	1	-	1
9	56-60	3	-	3
<b>Jumlah Total</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

#### 5. MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

NO	MASA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-04	1	-	1
2	05-09	3	1	4
3	10-14	3	-	3
4	15-19	-	-	-
5	20-24	-	-	-
6	25-29	2	-	2
7	30-34	1	-	1
8	35-39	2	-	2
9	40 lebih	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauhmana tingkat pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Kesbang Politik dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah/strategi untuk lebih maksimal di tahun-tahun mendatang.

#### 2.1 EVALUASI

**PELAKSANAAN  
RENJA OPD  
TAHUN 2017 DAN  
CAPAIAN  
RENSTRA OPD**  
Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Kabupaten

Humbang Hasundutan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan oleh sebab itu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) Tahun 2017 sebesar Rp. 3.310.194.696,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.071.559.069,- (92,79 %).

**b. Belanja Langsung**

Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 2.143.320.999,- termasuk perubahan APBD, dengan 4 program dan 18 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.678.590.114,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 78,32%.

✚ **Dari Pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 terdapat kegiatan yang telah memenuhi target kinerjanya, yaitu :**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- g. Penyediaan makanan dan minuman;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- i. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- a. Kominda
- b. Operasional Tim Verifikasi dan Monitoring Parpol Penerima Bantuan Keuangan

- c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- d. Tim Pembentukan Kader Bela Negara

#### **4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan**

- a. Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan

#### **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018**

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, usulan belanja langsung sebesar Rp. 1.826.862.880,- terurai dalam 5 Program dan 18 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat lebih tinggi dari pencapaian dari tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Kurangnya sumber daya manusia (ASN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan menyangkut kesatuan Bangsa dan Politik;
- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi koordinasi;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, maka strategi dan kebijakan akan ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (penghargaan dan hukuman), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;

- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang cukup untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan:  
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran guna mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan;

### **2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 yang terdiri dari 5 (lima) Program yang berhubungan dengan Pelayanan OPD yaitu :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
4. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
5. PROGRAM PENINGKATAN POLITIK MASYARAKAT

Bahwa Program tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

## 2.3 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

ISU STRATEGIS	SOLUSI YANG DIHARAPKAN
1. Masih ditemui penyakit masyarakat, narkoba, pencurian, perjudian	Perlu bekerjasama dengan stake holder terkait untuk penanganannya
2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih rendah	Pengalokasian anggaran untuk perekrutan, pelatihan secara khusus ASN untuk memahami ilmu keintelijen dan Teknik Negosiasi.
3. Belum Optimalnya penanganan konflik sosial ditengah masyarakat	Perlu peningkatan kinerja intelijen daerah secara khusus Bidang Penanganan Konflik Sosial dan kewaspadaan dini untuk mendeteksi dini gejala-gejala pemicu konflik sosial
4. Belum optimalnya Koordinasi antar lintas sektoral, Polri, TNI dan Kejaksaan, BIN	Perlu ditingkatkan fungsi koordinasi antar lintas sektoral, Polri, TNI dan Kejaksaan, BIN melalui rapat-rapat dan pertemuan
5. Masih ditemukan beberapa organisasi masyarakat yang kepengurusannya bermasalah	Koordinasi pemerintah kabupaten dengan ormas dan pihak terkait
6. Tingginya potensi konflik akibat gesekan kepentingan pada pemilu legislatif dan pilpres	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat

## 2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program Kegiatan Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Kegiatan :**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Yang terdiri dari Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Tersedianya jasa surat menyurat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 Bulan;
2. Tersedianya jasa tagihan telepon, listrik dan air pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
3. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
4. Tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan;
5. Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 Bulan;
6. Tersedianya komponen instalasi listrik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
7. Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
8. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
9. Terlaksananya rapat dan koordinasi di dalam daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 untuk mempermudah mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terpeliharanya Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan;
3. Terpeliharanya perlengkapan Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 12 bulan seperti, Laptop, PC, Printer dan pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional
4. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Badan Kesbang dan Politik selama 12 bulan;

### **3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

1. Operasional Tim terpadu penanganan konflik sosial
2. Operasional Komunitas Intelijen daerah (Kominda)
3. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran bela negara

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga mendorong peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan
2. Terjalinnnya koordinasi antar lintas sektoral baik pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, kejaksaan dan BIN di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka merespon/menyikapi setiap isu-isu yang berkembang;
3. Menumbuhkembangkan semangat nasionalisme bagi setiap insane masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kerangka NKRI pada situasi kemajemukan;

### **4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Tersedianya Laporan-laporan dan Dokumen Perencanaan;

### **5. Program Peningkatan Politik Masyarakat**

1. Penyuluhan Politik Bagi Generasi Muda

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Di dalam Rencana Kerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018 dijabarkan dalam tabel sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

#### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam kewenangan desentralisasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tugas lain yang diberikan Bupati, untuk itu disusun visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan salah satu institusi

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan visi yaitu: ***"Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Harmonis dan Kondusif"***

Untuk mewujudkan cita-cita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam visi tersebut diatas, maka yang menjadi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan kewaspadaan dini
4. Melaksanakan sinergitas antar lembaga pemerintahan
5. Meningkatkan pendidikan kehidupan berdemokrasi, politik dan HAM

## **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang terkandung dalam misi dan ini menampakkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai lima tahun. Maka tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah :

1. Terwujudnya situasi yang kondusif guna terselenggaranya pembangunan disegala bidang;
2. Terwujudnya wawasan kebangsaan sebagai pilar ketahanan bangsa;
3. Terwujudnya organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan serta organisasi politik yang mandiri;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi;
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat dan aparatur dalam mengembangkan kehidupan beragama, sosial ekonomi, dan berdemokrasi yang mandiri;
3. Meningkatkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI.
4. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.
5. Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## **STRATEGI**

1. Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan dan latihan, baik di dalam daerah maupun luar daerah.
2. Peningkatan Pemahaman dan Wawasan Kebangsaan dan rasa cinta tanah air dikalangan masyarakat
3. Fasilitasi dan Pengembangan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan/ Politik
4. Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## **KEBIJAKAN**

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, sesuai uraian tugas dan jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kebijakan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan kebangsaan
2. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/ Kepemudaan
3. Peningkatan Stabilitas Daerah
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Penempatan Personil sesuai dengan kebutuhan
6. Peningkatan Penatalayanan dan Sarana Prasarana

## **3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI**

Pencapaian Visi dan Misi Bupati Humbang Hasundutan dikaitkan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang diharapkan selaras atau sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut.

Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah melalui pendayagunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan ini dapat berarti peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi peningkatan itu bukan hanya sekedar menaikkan atau memperbesar melainkan harus mewujudkan suatu titik capaian. Keberhasilan pembangunan yang bersangkutan diukur dari sejauhmana pembangunan itu mewujudkan tingkat capaian yang ditetapkan. Tingkat capaian itu disebut visi yang akan menunjukkan arah pembangunan. Dalam hal ini visi akan menggambarkan ke manakah daerah yang bersangkutan akan dibawa dalam proses pembangunan. Tanpa visi ini, pembangunan akan tidak terarah dan keberhasilannya tidak akan dapat diukur. Visi akan memandu penyelenggara pembangunan dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakannya.

3 (tiga) hal yang membutuhkan perhatian dalam merumuskan visi suatu daerah adalah:

1. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
2. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
3. Letak geografis

Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, visi Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dirumuskan sebagai berikut:

## **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**

**Kabupaten Humbang Hasundutan** : Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Humbang Hasundutan. Unsur masyarakat terdiri dari pemerintah, perusahaan, dan perorangan.

**Hebat** : Hebat berarti Kabupaten Humbang Hasundutan harus setara dengan kabupaten-kabupaten besar lain di Indonesia yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yaitu dalam hal kemakmuran, tata kelola, dan mental unggul. Dari segi kemakmuran, Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan kemakmuran warganya sehingga setara dengan kemakmuran kabupaten-kabupaten ternama seperti Gianyar dan Kutai Timur yang tingkat pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dari segi tata kelola, Kabupaten Humbang Hasundutan akan melaksanakan pemerintahan yang bermartabat dan berwibawa dimana setiap kegiatan akan dilakukan melalui perencanaan yang benar, pemilihan orang yang tepat untuk melaksanakan setiap kegiatan, penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan jadwal kebutuhan dan keadaan lingkungan, serta melakukan pengawasan agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Kabupaten Humbang Hasundutan akan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan. Ini juga berarti pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini tentu saja didahului oleh peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Seluruh potensi alam akan dimanfaatkan pada tingkat pendayagunaan tertingginya. Seluruh potensi alam akan digali dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan tentu saja dengan memperhatikan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan adil dan merata sehingga seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembangunan infrastruktur yang adil adalah pembangunan yang disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata adalah pembangunan yang dinikmati oleh seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

**Bermental Unggul** : Warga Kabupaten Humbang Hasundutan harus bermental unggul. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menempah warganya menjadi manusia-manusia yang bermental besar dan kuat, yang tidak mudah menyerah, tidak mengeluh, tidak menuntut terlalu banyak, dan tidak cengeng, melainkan menjadi pekerja keras, ulet, dan berjiwa besar.

## MISI

Selanjutnya visi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan misi berikut ini :

### 1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan harus dilandasi oleh iman yang kuat serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan iman akan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan pendidikan agama dan moral, serta pemberdayaan para tokoh dan pemuka agama. Kerukunan dan saling mendukung antar agama yang berbeda akan ditingkatkan. Pembangunan iman juga akan dilakukan melalui penetapan iman dan taqwa sebagai landasan bagi semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Warga Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari berbagai jenis sumber daya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda dimana yang paling banyak adalah sumber daya manusia pertanian. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan mutu seluruh jenis sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain akan dibangun dalam jumlah yang cukup untuk mendidik dan melatih seluruh sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mutu sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersebut akan ditingkatkan terus-menerus agar dapat menghasilkan sumber daya yang bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkelas nasional.

Kualitas sumber daya manusia ini juga akan ditingkatkan melalui pembangunan sistem dan sarana kesehatan serta peningkatan mutu petugas-petugas layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas akan diperbesar dan diberdayakan serta mutunya akan ditingkatkan setiap saat.

Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar termasuk budaya dan pariwisata. Kabupaten Humbang Hasundutan akan menggali seluruh potensi sumber daya alam tersebut dan kemudian mendayagunakannya secara optimal agar Kabupaten Humbang Hasundutan dapat meningkatkan produksi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat mendukung pengembangan industri pariwisata terutama pariwisata alam dan budaya. Berbagai obyek wisata alam akan digali dan dikembangkan dan didayagunakan agar menjadi tujuan wisata yang dapat memberikan penerimaan yang besar. Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai budaya yang layak

untuk dikembangkan yang akan dijual kepada wisatawan. Pagelaran seni dan budaya daerah akan dirancang dan dikemas dalam bentuk yang layak jual.

### **3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, terarah, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi yaitu melalui pelaksanaan pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemilihan para peyelenggara pemerintahan juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dan kesesuaian keahlian.

Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada sasaran pembangunan dan disesuaikan dengan visi Kabupaten Humbang Hasundutan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akan ditingkatkan. Penegakan hukum juga akan ditingkatkan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan.

### **4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan**

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus memiliki kedaulatan pangan yang tinggi dimana masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus dapat menghasilkan sendiri pangan yang mereka butuhkan dan mereka tidak akan bergantung kepada daerah-daerah lain.

Karena wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari tanah-tanah pertanian, dan karena pertanian adalah mata pencaharian utama warga Kabupaten Humbang Hasundutan secara turun-temurun, karakteristik warga tersebut adalah petani-petani tradisional. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penyediaan bibit, pupuk, dan pestisida, pembangunan sistem pengairan yang cukup, pelaksanaan penyuluhan, pembangunan sistem informasi pertanian, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga akan membangun industri olahan berbahan baku barang-barang hasil pertanian.

Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan harus dicirikan oleh ekonomi kerakyatan dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengembangkan koperasi, dan usaha-usaha kecil, dan menengah serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menyadari keunggulan ekonomi kerakyatan.

### **5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan membangun seluruh sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Pembangunan

tersebut akan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem pengairan, permukiman, air, listrik, telepon, sanitasi, dan sebagainya. Tidak ada potensi ekonomi yang menganggur karena ketidakcukupan sarana dan prasarana infrastruktur. Tidak akan ada lagi daerah terpencil atau terisolasi. Pembangunan tersebut akan dilakukan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah ditetapkan. Keseimbangan sistem akan mendapat perhatian utama.

Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga tidak ada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui pengembangan wilayah yang terencana dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar warga Kabupaten Humbang Hasundutan.

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Program dan Kegiatan Unggulan/prioritas Badan Kesbang dan Politik untuk Tahun 2018 antara lain :

1. Program Pendidikan Politik dengan kegiatan Penyuluhan Politik bagi Generasi Muda.
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Keterkaitan program dan kegiatan dengan OPD dan instansi vertikal antara lain :

1. Dinas Pendidikan
2. Satpol PP
3. Instansi Vertikal seperti : KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan, Kementerian Agama, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, BIN.

## **C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

Program dan Kegiatan Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

### **A. Program pelayanan administrasi perkantoran;**

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

**B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;**

Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Roda 2
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**C. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;**

Kegiatan :

1. Operasional Tim Terpadu penanganan konflik sosial
2. Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Operasional pendataan, pemetaan dan antisipasi konflik
4. Sosialisasi penanggulangan Terorisme
5. Operasional tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
6. Operasional pendataan dan monitoring tenaga kerja asing
7. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

**D. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

1. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara
2. Pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan

**E. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Dokumen Perencanaan
2. Biaya Pendidikan dan pelatihan

**F. Program Pendidikan Politik Masyarakat**

1. Kegiatan Penyuluhan Politik bagi Generasi Muda.

2. Sosialisasi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden
3. Tim Verifikasi dan Monitoring Partai Politik penerima bantuan keuangan

### **G. Program Peningkatan Kualitas Ormas dan LSM**

1. Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.
2. Pendataan, Pembinaan dan Monitoring Ormas dan LSM
3. Tim Terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan

### **H. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat**

1. Sosialisasi pencegahan peredaran dan penggunaan minuman keras dan narkoba
2. Sosialisasi pencegahan praktek prostitusi
3. Sosialisasi pencegahan eksploitasi anak di bawah umur

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan OPD.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan koordinasi kerja satuan lembaga akan terus ditingkatkan, demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan Renja OPD, terlebih dalam upaya sinkronisasi program kegiatan dari semua instansi terkait dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mengacu kepada Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pendidikan dan latihan, Peningkatan Pemahaman dan Wawasan Kebangsaan dan rasa cinta tanah air, Fasilitasi dan Pengembangan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan/ Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Optimalisasi peran dan fungsi aparatur dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang diharapkan akan memberikan gambaran tentang apa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2018. Dan diharapkan dapat menjadi acuan dan dipedomani dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam pelaksanaannya bisa saja terdapat perubahan sesuai dengan kondisi nyata dilapangan namun dengan adanya perencanaan ini dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi secara maksimal untuk pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik demi terwujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan,  
**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018, sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan yang didasarkan kepada

# RENCANA KERJA | 2019

---

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 - 2021. Mudah- mudahan apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, semoga Tuhan menyertai kita semua.

**Doloksanggul, Pebruari 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**THOMSON HUTASOIT, SH.MH  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19670831 199503 1 002**